

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### 4.1. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini akan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menyimpulkan BAB I dan BAB II, dengan pembagian penyimpulan mengenai Yudhoyono, *pivot to Asia*, dasar politik luar negeri Indonesia, serta hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Setelah itu, di bagian selanjutnya akan disimpulkan bagaimana analisis Konstruktivisme menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, dengan pembagian sesuai dengan ketiga dalil yang terdapat pada teori Konstruktivisme.

Kebijakan *Pivot to Asia* merupakan kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Kebijakan ini merupakan hasil dari pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintahan Obama, untuk merubah fokus Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah, menjadi kepada Asia. Hal ini dilakukan karena Amerika Serikat memandang Asia sebagai tempat dari pusat aktivitas politik dan ekonomi dunia. Beberapa negara menjadi tujuan dari Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakan ini, seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Filipina, India, Thailand, Singapura, serta Indonesia. Negara-negara tersebut memiliki responnya masing-masing terhadap kebijakan tersebut, khususnya Indonesia.

Indonesia, pada saat kebijakan *pivot to Asia* dijalankan sedang berada di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, seseorang yang memiliki latar belakang militer panjang, serta sebagai birokrat dan juga seorang politisi. Di masa

pemerintahan Yudhoyono, Indonesia menerapkan suatu prinsip politik luar negeri yang disebut sebagai '*a million friends, zero enemy*'. Prinsip ini digunakan oleh pemerintahan Yudhoyono terhadap aktor-aktor internasional, termasuk Amerika Serikat. Penerapan prinsip ini juga lahir dari kepercayaan Yudhoyono bahwa Indonesia dapat menjalankan politik luar negerinya ke segala arah dengan tidak memiliki musuh, serta memiliki teman yang banyak.

Politik luar negeri Indonesia sendiri berdasar pada tiga hal, yaitu UUD tahun 1945, politik luar negeri bebas aktif, serta UU. No. 37 tahun 1999. Di dalam UUD sendiri, disebutkan beberapa hal yang mendasari politik luar negeri Indonesia, seperti penolakan terhadap penjajahan, serta keinginan Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia. Dasar politik luar negeri Indonesia yang terdapat pada UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Undang-undang no. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. UU tersebut juga merupakan hasil dari ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, serta Konvensi tentang Misi Khusus pada tahun 1969 di New York. Pada bab I UU tersebut, dijelaskan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia berdasar pada UUD 1945, Pancasila serta garis-garis besar haluan negara. Selanjutnya dijabarkan bahwa politik luar negeri Indonesia berprinsip bebas aktif, untuk kepentingan nasional melalui diplomasi yang aktif, kreatif, dan antisipatif. Tidak bersifat rutin dan reaktif, memegang kuat prinsip dan pendirian, juga bersifat rasional dan luwes dalam melaksanakan pendekatan. Dari dasar tersebut, juga terdapat prinsip bebas aktif dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yang dikemukakan oleh Sjahrir dan Hatta pada tahun 1947 dan 1948. Prinsip bebas dan

aktif sendiri bukanlah prinsip yang membuat Indonesia menjadi negara yang hanya diam dan tidak bersikap pada isu-isu atau kejadian-kejadian internasional, tetapi sebaliknya, yaitu dengan tetap aktif mempromosikan politik luar negeri yang positif dan bebas dalam memposisikan diri pada politik internasional. Juga disebutkan pada penjelasan tersebut bahwa Indonesia tidak dengan apriori mengikatkan diri kepada suatu kekuatan dunia, yang artinya Indonesia tidak boleh ingin terikat dengan suatu kekuatan dunia dengan prasangka, sebelum mengerti bagaimana keadaan yang sebenarnya. Dasar-dasar tersebut kemudian juga dijalankan oleh pemerintahan Indonesia, termasuk pada masa pemerintahan Yudhoyono.

Kebijakan *pivot to Asia* sendiri merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Amerika Serikat pada masa kepresidenan Barack Obama. *Pivot to Asia* pertama kali dicanangkan oleh pemerintahan Obama pada musim gugur tahun 2011 dan pada awal tahun 2012, yang pada saat itu disebutkan bahwa Amerika Serikat akan melakukan usaha yang lebih intensif dalam berperan di kawasan Asia-Pasifik. Kebijakan ini dilakukan dengan lebih memprioritaskan perencanaan militer Amerika Serikat, kebijakan luar negeri dan kebijakan ekonomi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Tujuan Obama dalam menjalankan kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa Amerika Serikat akan memainkan peranan yang lebih besar dan secara jangka panjang memainkan peranan dalam membentuk kawasan Asia-Pasifik serta masa depan dari kawasan tersebut. Menurut Tom Donilon, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, tujuan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat adalah bagaimana negara tersebut membantu untuk membentuk norma serta aturan-aturan di kawasan Asia-Pasifik. *Pivot to Asia* juga merupakan bentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang diterapkan setelah dilakukan tinjauan

oleh pemerintahan Obama, yang dimulai sejak tahun 2008. Di dalam tinjauan tersebut, ditemukan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam fokus Amerika Serikat terhadap kepentingannya terhadap dunia. Ketidakseimbangan ini dinilai melalui presensi kekuatan militer Amerika Serikat yang terlalu banyak di Eropa dan di kawasan Timur Tengah. Melihat condongnya kekuatan Amerika Serikat di dalam ke dua kawasan tersebut, pada tahun 2011, Hillary Clinton sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada saat itu menandakan langkah awal Amerika Serikat untuk memperluas peranan Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. Secara umum, terdapat 6 poin utama yang dilakukan Amerika Serikat untuk menjalankan kebijakan *pivot to Asia*, yaitu: memperluas perdagangan dan investasi, meningkatkan kehadiran secara militer, memajukan demokrasi serta HAM, memperkuat hubungan dengan *emerging powers*, dan menjalin hubungan dengan institusi multilateral di kawasan Asia.

Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia sendiri telah terjalin sejak masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadi beberapa peningkatan dan penurunan tingkat hubungan antara kedua negara. Seperti hubungan di masa Presiden Sukarno yang buruk dikarenakan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Indonesia yang menjadi komunis di masa pemerintahan Sukarno, lalu kemudian pasang-surut di masa pemerintahan Presiden Suharto – mulai dari bantuan Amerika Serikat kepada Indonesia dalam aneksasi Timor Leste, memburuk ketika Kongres Amerika Serikat menghentikan bantuan pelatihan militer kepada Indonesia, sampai peranan Amerika Serikat dalam krisis finansial Indonesia tahun 1997-1998 yang membuat kurangnya kepercayaan Indonesia terhadap Amerika Serikat di masa tersebut. Masa lalu hubungan bilateral Amerika

Serikat dan Indonesia pada diwarnai dengan kasus HAM dan ketidaksukaan Indonesia terhadap perang Amerika Serikat terhadap Irak pada masa pemerintahan George W. Bush, karena masyarakat Indonesia melihat hal tersebut merupakan peperangan terhadap Islam dan melanggar norma-norma Internasional. Ketika Yudhoyono menjadi Presiden RI, hubungan antara kedua negara mulai membaik. Hal ini ditandai dengan bantuan Amerika Serikat terhadap Indonesia ketika terjadi Tsunami pada 26 Desember 2004. Kemudian perbaikan hubungan dilanjutkan dengan dilanjutkannya kembali bantuan pelatihan militer serta menghapus larangan kongres terhadap Bantuan Finansial Militer (BFM – *Foreign Military Financing, FMF*) pada tahun 2005, yang membuat hubungan militer antar kedua negara membaik. Kedua hal tersebut dilakukan ketika George W. Bush masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Pada tahun 2008, setelah Obama terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, Yudhoyono berusaha menawarkan proposal *US-Indonesia Comprehensive Partnership* terhadap Amerika Serikat, yang mencakup kerja sama pada beberapa sektor, seperti: perdagangan dan investasi, pendidikan, keamanan dan pertahanan, kesehatan, energi dan isu-isu transnasional seperti non-proliferasi nuklir serta perubahan iklim. Di tahun ini juga, perspektif masyarakat Indonesia berubah, melihat hasil dari pemilihan Presiden Amerika Serikat yang memenangkan Obama. Lalu di tahun 2010, ketika Robert Gates, Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengunjungi Indonesia, ia mengumumkan untuk menghentikan larangan hubungan dan bantuan terhadap Kopassus. Hilary Clinton dan Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri dari kedua negara, melakukan pertemuan bilateral pertama dalam hal *Comprehensive Partnership* dan mulai mengumumkan rencana kerja untuk melaksanakan hal tersebut. Pada akhir tahun

2010 di Bulan November, Obama kemudian mengunjungi Indonesia dalam rangka turnya di Asia.

Dalam hal analisis pada penelitian ini, dapat disimpulkan melalui tiga bagian berdasarkan ketiga dalil yang digunakan dari teori Konstruktivisme. Bagian pertama akan menyimpulkan analisis mengenai pengaruh dari struktur terhadap langkah yang dilakukan agen, lalu bagian kedua akan membahas kesimpulan dari analisis bagaimana struktur mempengaruhi pembentukan identitas dan kepentingan aktor, dan kemudian akan disimpulkan bagaimana agen dan struktur saling memiliki hubungan timbal balik.

Dari analisis bagaimana struktur mempengaruhi tindakan agen, dapat dilihat bahwa dasar politik luar negeri Indonesia mempengaruhi bagaimana Yudhoyono menerapkan prinsipnya dalam berpolitik luar negeri. Pertama, prinsip yang dikemukakan Yudhoyono merupakan sebuah luaran dari politik luar negeri yang bebas dan aktif. Penerapan dari prinsip tersebut dapat membuat Indonesia bebas untuk menentukan arah dan pergerakan, serta langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan kebijakan luar negeri. Hal ini disebabkan oleh, pada prinsip politik luar negeri yang digunakan oleh Yudhoyono, Indonesia memilih untuk tidak memiliki musuh, serta memiliki sejuta teman, yang merupakan metafora dari keinginan Indonesia untuk dapat bergerak secara aktif dan bebas terhadap isu-isu internasional. Dengan tidak memiliki musuh juga, Indonesia dapat berkontribusi secara luwes, seperti yang disebutkan di UU no. 37 tahun 1999, terhadap isu-isu serta permasalahan-permasalahan internasional. Lalu, dengan kebebasan karena tidak memiliki musuh tersebut, Indonesia dapat memilih untuk tidak memihak pada pihak manapun, dengan artian pada suatu sistem atau aktor

internasional tertentu. Kedua, seperti yang disebutkan pada poin pertama, bahwa Indonesia dapat memilih untuk tidak memihak pada pihak manapun, juga kemudian berpengaruh terhadap Doktrin Natalegawa. Hal ini disebabkan oleh adanya asumsi pada doktrin tersebut, yang menyebutkan bahwa terdapat kebangkitan India dan Tiongkok dalam politik internasional, tetapi asumsi oleh doktrin tersebut menyebutkan bahwa hal tersebut tidak mengancam bagi Indonesia. Doktrin tersebut juga beranggapan bahwa terdapat urgensi untuk dibentuknya suatu kerja sama yang bersifat jangka panjang, sehingga kondisi permusuhan dapat dicegah, khususnya di kawasan Samudra Hindia.

Selain itu, tujuan dari dilaksanakannya kebijakan *pivot to Asia* adalah agar terdapat ketaatan terhadap norma hukum internasional, perdagangan, dan kebebasan navigasi. Lalu, juga terdapat tujuan agar negara *emerging power* dapat meningkatkan kepercayaan dengan negara yang bertetangga dengan mereka, dan supaya cara-cara yang mengancam atau dengan kekerasan dapat dihilangkan, sehingga cara yang damai dapat lebih dipilih dalam penyelesaian suatu permasalahan (Manyin, et al., 2012). Tujuan tersebut memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dari diterapkannya prinsip *a million friends, zero enemy* dan Doktrin Natalegawa yang digunakan pada masa pemerintahan Yudhoyono, yaitu adanya kesempatan bagi negara-negara *emerging power* untuk tetap berkembang.

Dalam hal bagaimana prinsip tersebut digunakan Yudhoyono dalam merespon kebijakan *pivot to Asia*, dapat dilihat melalui beberapa langkah yang dilalukan pemerintahannya terhadap Amerika Serikat. Pertama, melalui kesepakatan *US-Indonesia Strategic Partnership*. Dengan adanya kesepakatan ini, Yudhoyono menjalin hubungan yang lebih kuat dengan Amerika Serikat. Apabila

pada masa pemerintahan RI sebelum Yudhoyono, serta ketika kepresidenan Yudhoyono dan Bush bersinggungan, hubungan kedua negara berada dalam kondisi yang kurang baik. Melalui kesepakatan tersebut, pemerintahan Yudhoyono berusaha untuk memperbaiki sekaligus mencapai titik tertinggi hubungan kedua negara. Hal ini juga merupakan langkah yang dilakukan dengan menggunakan prinsip *a million friends, zero enemy* serta Doktrin Natalegawa, karena pada prinsip tersebut, dikatakan bahwa Indonesia berusaha untuk bergerak secara leluasa dan berperan aktif dalam isu internasional, serta berusaha untuk tetap berkembang dengan anggapan mengenai kondisi *dynamic equilibrium*. Dengan memiliki perkembangan ekonomi, demokrasi dan politik yang baik, Indonesia kemudian menawarkan *US-Indonesia Comprehensive Partnership*, yang selain untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara, juga untuk melaksanakan bagian dari kepentingan nasional Indonesia, yaitu menjamin keberlangsungan perkembangan negara tersebut. Selain itu, dapat terlihat bahwa komitmen Indonesia sejak dulu terhadap lingkungan dan iklim, melatarbelakangi adanya kelompok kerja mengenai hal tersebut pada *US-Indonesia Comprehensive Partnership*.

Kedua, dalam perspektif Konstruktivisme, respon terhadap terpilihnya Obama sebagai Presiden Amerika Serikat oleh Yudhoyono tidak hanya dilandaskan pada pandangan positif masyarakat Indonesia dan latar belakang dari Obama itu sendiri. Hal yang mempengaruhi respon tersebut adalah latar belakang Yudhoyono yang pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat, sehingga terdapat kedekatan personal dalam menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Kedekatan personal tersebut tidak hanya terdapat ketika Obama mulai menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, tetapi juga sudah ada sejak masa pemerintahan



Yudhoyono bersinggungan dengan pemerintahan Bush. Respon yang lebih positif tercipta pada saat Obama terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat dikarenakan adanya persepsi yang demikian oleh publik Indonesia, sehingga seakan-akan terlihat bahwa Yudhoyono hanya berusaha memiliki hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat pada masa Obama, yang di sisi lain merupakan hal yang keliru, karena ketika Bush masih memimpin Amerika Serikat, hubungan kedua sudah mulai diperbaiki oleh Yudhoyono. Ketiga, Yudhoyono di masa pemerintahannya juga melakukan langkah multilateral dalam merespon kebijakan *pivot to Asia*. Langkah yang dilakukan pada lingkup multilateral adalah dengan adanya dukungan Indonesia terhadap masuknya Amerika Serikat dan Rusia pada *East Asia Summit* (EAS). Terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa dukungan Indonesia terhadap masuknya Amerika Serikat di EAS merupakan bentuk dari usaha Indonesia untuk menyeimbangkan masuknya Tiongkok pada pertemuan multilateral tersebut (Anwar, 2013), tetapi pandangan Konstruktivisme memberikan cara pandang berbeda mengenai masuknya Amerika Serikat di EAS, khususnya dalam melihat bagaimana pemerintahan Yudhoyono hal tersebut. Hal yang dilihat oleh pandangan Konstruktivisme adalah, gagasan yang dikemukakan oleh Yudhoyono mengenai prinsip politik luar negeri-*a million friends, zero enemy*-memberikan pengaruh langsung terhadap langkah yang dilakukan Indonesia dalam usaha untuk memasukkan Amerika Serikat ke dalam EAS. Hal ini didasari pada prinsip *a million friends, zero enemy*, Doktrin Natalegawa dan latar belakang dari Yudhoyono.

Keempat, latar belakang Yudhoyono sebagai anggota militer juga turut berpengaruh terhadap respon Indonesia terhadap kebijakan *pivot to Asia*, khususnya

dalam hal kerja sama keamanan. Hal ini dapat dilihat dari dicabutnya larangan kontak antara militer Amerika Serikat terhadap pasukan elit Indonesia, Komando Pasukan Khusus (Kopassus), pada saat Obama memimpin Amerika Serikat. Apabila dilihat dari pandangan Konstruktivisme, Indonesia mendukung hal tersebut karena Yudhoyono sendiri memiliki karier yang panjang di militer Indonesia. Sejak masuk menjadi Taruna AKABRI pada tahun 1970 sampai kemudian pensiun dari dinas militer pada tahun 1999, Yudhoyono sudah memiliki latar belakang militer yang kuat.

Dalam hal bagaimana struktur membentuk identitas dan kepentingan aktor, dapat dilihat bahwa Yudhoyono memiliki tiga latar belakang utama, yaitu latar belakang militer, birokrat serta politisi. Latar belakang militer didapatkan dari perjalanan kariernya di militer Indonesia sejak tahun 1970 di AKABRI, lalu latar belakang birokrat didapatinya dari kariernya sebagai menteri, baik itu di masa pemerintahan Wahid maupun masa pemerintahan Megawati. Lalu, latar belakang politisi merupakan latar belakang yang didapatkan dari keanggotaan Yudhoyono di Partai Demokrat. Dari latar belakangnya sebagai anggota militer, Yudhoyono memiliki rekam jejak beberapa kali sebagai komandan, panglima, kepala staf, dan posisi strategis lainnya. Dari hal ini dapat dilihat bahwa Yudhoyono merupakan pemimpin militer yang berpengalaman baik serta dipercaya oleh pemangku kebijakan di atas Yudhoyono ketika di militer. Kedua, selama ia aktif sebagai anggota militer Indonesia, Yudhoyono juga pernah ditugaskan di luar negeri, yaitu di Yugoslavia, dengan masuk menjadi bagian satuan di PBB, yaitu *United Nations Protection Force* pada tahun 1995. Tidak hanya penugasan di luar negeri, Yudhoyono juga pernah mengenyam pendidikan militer dan non-militer di Amerika

Serikat, seperti di Fort Benning, Fort Leavenworth dan Universitas Webster. Dari latar belakang ini, Yudhoyono dapat dilihat sebagai pribadi yang memiliki latar belakang kepemimpinan militer serta pengalaman internasional, utamanya pengalaman pendidikan di Amerika Serikat.

Latar belakang sebagai menteri juga memiliki kemiripan dengan latar belakangnya sebagai anggota militer, yaitu kepemimpinan serta kepercayaan atasan atas dirinya. Hal ini dapat dinilai berdasarkan posisi Yudhoyono sebagai menteri yang dijabat sebanyak tiga kali, yaitu dua posisi menteri yang berbeda di masa Wahid, serta satu posisi menteri di masa pemerintahan Megawati. Pengalamannya sebagai menteri selama lima tahun (1999-2004) telah memberikan Yudhoyono dasar-dasar sebagai birokrat di Indonesia, serta memahami secara langsung bagaimana pemerintahan di Indonesia dijalankan. Artinya, Yudhoyono juga telah mengetahui bagaimana kekurangan serta kelebihan dari pemerintahan Wahid dan, utamanya Megawati. Hal ini tentu diperlukan agar Yudhoyono dapat memberikan perubahan-perubahan dan langkah-langkah yang diperlukan ketika ia mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia, baik itu untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden RI tahun 2004, juga guna membentuk kerangka kerja ketika dirinya terpilih menjadi Presiden Indonesia.

Terakhir, dalam hal penyimpulan dalam analisis hubungan timbal balik antara agen dan struktur, didapatkan kesimpulan bahwa Cara yang dilakukan oleh Yudhoyono untuk tetap mempertahankan dasar politik luar negeri Indonesia adalah dengan menggunakan prinsip *a million friends, zero enemy*. Prinsip *a million friends, zero enemy* lahir dengan anggapan agar Indonesia dapat memposisikan diri di tengah dalam suatu isu internasional. Selain itu, prinsip ini juga digunakan di

masa pemerintahan Yudhoyono agar Indonesia dapat melangsungkan diplomasi ke segala sisi. Contoh dari pelaksanaan diplomasi ke segala sisi ini adalah, Indonesia dapat memberikan peranan yang lebih besar di tingkat kawasan, seperti misalnya di Asia Tenggara, tetapi di sisi lain Indonesia juga dapat secara aktif menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara lain di luar kawasan, seperti misalnya Amerika Serikat. Prinsip ini juga merupakan luaran dari Doktrin Natalegawa, yang menyebutkan bahwa posisi Indonesia berada di posisi ekuilibrium dinamis. Artinya, Indonesia sedang berada pada posisi yang kondusif untuk tetap maju, dengan dasar bahwa negara-negara berkembang sedang semakin tidak memiliki ketergantungan terhadap negara dengan berkekuatan dominan.

Terdapat beberapa kesamaan nilai antara kedua bentuk gagasan ini. Pertama, kedua gagasan berusaha agar Indonesia dapat menentukan arahnya sendiri. Menurut prinsip yang digunakan pada masa Yudhoyono, hal ini diaplikasikan melalui anggapan mengenai Indonesia yang dapat berdiplomasi ke segala sisi dan dapat memposisikan diri di tengah. Di lain sisi, pada dasar politik luar negeri Indonesia diterapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang menginginkan Indonesia agar dapat bergerak tidak secara apriori, sehingga Indonesia tidak berada pada sistem yang tidak sesuai dengan negara tersebut. Kedua, kesamaan dalam hal agar Indonesia dapat secara aktif melaksanakan politik luar negeri. Pada prinsip *a million friends, zero enemy*, disebutkan bahwa Indonesia dapat memberikan peranan yang lebih besar terhadap isu di kawasan sembari menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara lainnya di luar kawasan. Selain itu, Indonesia juga diharapkan mampu meredam permusuhan, seperti misalnya terhadap kebangkitan Tiongkok dan India di kawasan Asia. Di sisi yang berbeda,

dasar politik luar negeri Indonesia menginginkan negara tersebut untuk tetap berperan secara aktif dalam memberikan sumbangan, baik itu secara ide ataupun bentuk partisipasi aktif dalam isu-isu internasional, seperti konflik atau sengketa. Ketiga, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia digunakan untuk kepentingan bangsa. Dalam prinsip yang digunakan Yudhoyono, dijabarkan melalui Doktrin Natalegawa bahwa kondisi politik internasional pada saat itu berada pada ekuilibrium dinamis, yang memungkinkan negara *emerging power* untuk berkembang dan semakin berkurangnya ketergantungan terhadap negara berkekuatan dominan. Artinya, prinsip *a million friends, zero enemy* memperhatikan bahwa kondisi politik internasional dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yang dijelaskan pada UU no. 37 tahun 1999, sebagai bentuk yang erat dengan ketahanan nasional. Artinya, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga harus memperhatikan ketahanan nasional guna menciptakan daya tangkal dan daya tahan, untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan Indonesia agar tujuan nasional dapat tercapai.

#### **4.2. Saran**

Pada penelitian ini, masih terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pengembangan ke depan. Penelitian ini sudah mencakup analisis terhadap latar belakang Yudhoyono dalam mempengaruhi bagaimana Indonesia merespon kebijakan *pivot to Asia* yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dalam proses analisis penelitian ini, digunakan teori Konstruktivisme, khususnya dalam hal hubungan struktur dan agen yang dikemukakan Wendt. Meskipun demikian, perlu dilakukan penelitian lain dengan cakupan yang lebih luas ataupun melalui sudut pandang yang

berbeda, seperti menggunakan teori lain yang terdapat pada bidang ilmu hubungan internasional, atau menggunakan dasar pemikiran yang berbeda yang terdapat pada teori Konstruktivisme.

Selain itu, penelitian ini menggunakan data literatur sebagai sumber utama sebagai dasar untuk menganalisis isu yang diangkat. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan penulis untuk mendapatkan data langsung dari pihak-pihak utama dalam isu ini. Pada penelitian yang dapat dikembangkan nantinya, akan lebih baik apabila terdapat sumber-sumber langsung yang pernah berkecimpung dalam pemerintahan Indonesia, khususnya dalam hal hubungan dengan Amerika Serikat, seperti Dino Djajal, Marty Natalegawa, atau Yudhoyono tersendiri. Hal tersebut akan membuat penelitian lanjutan yang dapat dilakukan memberikan kontribusi lebih terhadap studi hubungan internasional, khususnya di Indonesia.

Lalu, hasil penelitian yang didapatkan diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam hal menjalin hubungan dengan Amerika Serikat ataupun dengan *major power* lainnya. Pada penelitian ini, dapat terlihat bahwa terdapat dasar politik luar negeri serta arah kebijakan luar negeri yang digunakan oleh suatu rezim memiliki keterkaitan yang kuat terhadap bagaimana Indonesia merespon suatu kebijakan negara lainnya. Oleh sebab itu, kepada rezim pemerintahan selanjutnya, diharapkan penelitian ini mampu memberikan penekanan terhadap pentingnya arah kebijakan luar negeri yang sesuai dengan dasar politik luar negeri Indonesia.